

BAB II

PROFIL PARTAI MASYUMI DAN NAHDLATUL ULAMA

2.1. Profil Partai Masyumi

Wacana pembentukan partai politik Islam Indonesia telah muncul sekitar 1 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kesadaran mengenai pentingnya membentuk partai politik untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam timbul secara alamiah dalam benak pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia. Mohamad Roem menyatakan bahwa pembicaraan mengenai pembentukan partai Islam telah bermula jauh sebelum Maklumat 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik diserukan kepada segenap rakyat Indonesia.⁴⁸ Ia mengatakan keputusan untuk membentuk partai Islam telah diambil oleh sejumlah pemimpin Islam di Jakarta dan Yogyakarta.⁴⁹ Persiapan pembentukan partai Islam tersebut direalisasikan ketika perwakilan umat Islam dari Pulau Jawa dan Madura berkumpul dalam Mukhtar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7-8 November 1945.

2.1.1. Pembentukan Partai Masyumi

Mukhtar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta menjadi tonggak pembentukan Masyumi sebagai partai Islam di Indonesia. Pelaksanaan mukhtar tersebut merupakan wujud komitmen umat Islam Indonesia dalam

⁴⁸ Soemarso Soemarsono, *op cit*, hlm 60..

⁴⁹ Para pemimpin Islam ini adalah Haji Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, K.H. Abdul Wahid Hasyim, dr. Soekiman Wirjosandjojo, Mohamad Roem, Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan dr. Abu Hanifah. Lihat dalam Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 61-62. Lihat juga dalam Remy Madinier, *op cit*, hlm. 66.

mempertahankan kedaulatan Indonesia dan kemuliaan agama Islam. Muktamar Umat Islam Indonesia digelar selama dua hari, terhitung sejak 7-8 November 1945, di Gedung Madrasah Muallimin Ketanggungan Yogyakarta.⁵⁰ Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti secara antusias oleh perwakilan umat Islam dari Pulau Jawa dan Madura. Rombongan pemuka umat Islam dan para pemuda Islam dari berbagai penjuru Pulau Jawa dan Madura berkumpul, memadati lokasi pelaksanaan muktamar. K.H. Saifuddin Zuhri, salah seorang pimpinan NU, menggambarkan dengan cukup jelas suasana keramaian yang terjadi selama penyelenggaraan muktamar itu dalam otobiografinya:

“Kongres tersebut dilangsungkan di madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang fasilitasnya terbatas. Peserta yang datang melebihi kapasitas, berjejalan. Dan jangan lupa, di zaman revolusi harga seorang pemimpin diukur, selain dari pidatonya yang gemuruh di atas podium, juga dari berapa banyak *'bodyguard'* bersenjata lengkapnya”⁵¹

Perwakilan umat Islam yang hadir pada muktamar saat itu terdiri atas para ulama, aktivis pergerakan Islam, para pemimpin pondok pesantren dan pimpinan madrasah yang jumlahnya sekitar 500 orang.⁵² Muktamar itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Indonesia dan para bangsawan Jawa Tengah. Mereka yang hadir sebagai tamu agung dalam muktamar tersebut adalah Abikusno Tjokrosujoso selaku Menteri Perhubungan mewakili Presiden Sukarno, K.H. Abdul Wahid Hasyim selaku Menteri Negara, Letnan Jenderal Oerip Soemoehardjo, R. Soetoepo selaku Wakil Komisaris Tinggi Daerah Kejawen, Sri

⁵⁰ *Kedaulatan Rakjat*, 8 November 1945

⁵¹ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*. Yogyakarta: LKis, 2013, hlm. 330

⁵² *Kedaulatan Rakjat*, *loc cit*, 8 November 1945

Sultan Hamengkubuwono IX Adipati Paku Alam VIII, Wakil Kasunan Surakarta, serta para wartawan yang datang untuk meliput peristiwa penting tersebut.⁵³

Penyelenggaraan Muktamar Umat Islam Indonesia terbukti menjadi salah satu peristiwa penting di Indonesia. Harian *Kedaulatan Rakjat* yang berkedudukan di Yogyakarta melaporkan kegiatan tersebut selama tiga hari berturut-turut, terhitung sejak 7-9 November 1945. Laporan mengenai pelaksanaan Muktamar Umat Islam Indonesia sempat diabadikan menjadi *headline news* harian *Kedaulatan Rakjat* yang terbit pada 9 November 1945.⁵⁴ Tulisan “65 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah”, terpampang jelas menjadi tajuk *headline news*. Tajuk tersebut diiringi serangkaian tulisan mengenai keputusan yang diambil kegiatan itu dan laporan mengenai jalannya rapat umum umat Islam. Keputusan muktamar itu terdiri atas dua bagian yaitu untuk dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini adalah keputusannya:

Oentoek Dalam Negeri

1. Memperkoeat persiapan Oemmat Islam oentoek berdjihad fi sabilillah
2. Memperkoeat barisan pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai2 oesaha jang diwajibkan oleh Agama Islam.
3. Menjesoeaikan soesoenan dan sifat Masjoemi sebagai Poesat Persatoan Oemmat Islam Indonesia, sehingga dapat mengerahkan dan memimpin perdjoeangan dan memimpin perdjoeangan Oemmat Islam Indonesia seloeroehnja.
4. Menghormati dan menghargai djasa pahlawan2 teroetama Angkatan Moeda baik jang tiwas maoepoen jang tidak dalam perdjoeangan menegakkan Kedaulatan Negara.
5. Mohonkan kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja mendesak kaoem Sekoetoe menjegerakan perloetjoetan sendjata tentera Djepang dan pengembaliannja agar balatentera Sekoetoe dapat segera poelang ke negerinja.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Lihat dalam lampiran 1.

⁵⁵ *Ibid.*

Oentoek Loear Negeri

1. Menjampaikan poetoesan ini kepada Doenia Internasional oemoemnja dan Doenia Islam choesoensja.

Resoloesi ini disampaikan kepada

1. Pemerintah Repoeblik Indonesia
2. Rakjat Indonesia oemoemnja dan Oemmat Islam ⁵⁶

Salah satu butir putusan yang dihasilkan dari muktamar tersebut adalah menjadikan Masyumi sebagai saluran aspirasi politik umat Islam Indonesia. Keputusan muktamar untuk membentuk partai politik Islam tidak dapat dipisahkan dari Maklumat Wakil Presiden pada 3 November 1945 yang berisi anjuran pada rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik. Para pemimpin Islam sebenarnya cukup menyesalkan maklumat tersebut. Mereka menyatakan bahwa maklumat tersebut dapat memicu perpecahan di tengah rakyat Indonesia, akan tetapi, sebagai bentuk dukungan umat Islam Indonesia untuk perjuangan mempertahankan kedaulatan tanah airnya, maka umat Islam merasa perlu untuk membentuk partai politik. Hal demikian dinyatakan cukup jelas oleh dr. Soekiman Wirjosandjojo,⁵⁷ Ketua Pengurus Besar Masyumi yang pertama.

“Walaupoen dalam sa’at jang segenting ini, jang menghendaki persatoepadoean Ra’jat lahir batin setegeoh-tegoehnja, pengemoeman dan andjoeran Pemerintah mendirikan patai-partai jang akan berakibat terpetjah belahnja Ra’jat, kita sesalkan, akan tetapi alasan, bahwa dengan adanja partai-partai itoe dapatlah dipimpin kedjalan jang terator (dalam partai) segala aliran paham jang ada dalam masjarakat, tidak dapat disangkal.”⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Pada bagian selanjutnya dr. Soekiman Wirjosandjojo akan disebut Soekiman; potret wajah Soekiman dapat dilihat dalam lampiran 2.

⁵⁸ PB. Masjoemi. *Masjoemi Partai Politik Oemmat Islam Indonesia*. Tanpa kota: Pengoroes Besar Partai Masjoemi Yogyakarta, 1945, hlm. 7.

Muktamar Umat Islam Indonesia menjadi tonggak perubahan sifat organisasi Masyumi. Melalui teks keputusan Muktamar Umat Islam Indonesia dapat diketahui rupanya pembentukan Masyumi sebagai partai politik Islam tidak bermula dari titik nol. Hal tersebut terlihat dalam butir ke-3 hasil putusan muktamar untuk dalam negeri, peserta muktamar rupanya menghendaki penyesuaian susunan dan sifat Masyumi Jepang.⁵⁹ Sifat organisasi Masyumi yang semula hanya sekadar badan federasi disesuaikan menjadi badan perjuangan politik umat Islam yang harapannya dapat menjadi wadah menghimpun, mengerahkan, dan memimpin perjuangan umat Islam Indonesia.

Peserta Muktamar Umat Islam Indonesia memilih “Masyumi” sebagai nama resmi untuk partai politik Islam di Indonesia. “Masyumi” diputuskan sebagai nama partai Islam yang diresmikan pada 7 November 1945, berhubung istilah tersebut sudah terlanjur populer di kalangan masyarakat Indonesia, meski demikian, istilah Masyumi itu tidak menggunakan kepanjangan, “Majelis Syura Muslimin Indonesia” selayaknya pada era Pendudukan Jepang. Masyumi yang dimaksud di sana hanya sekadar nama saja.⁶⁰ Mohamad Roem menerangkan bahwa sebenarnya ia bersama Haji Agus Salim telah mengusulkan agar partai Islam yang hendak dibentuk itu diberi nama “Partai Rakyat Islam”,⁶¹ akan tetapi, saat dilakukan pemungutan suara, pilihan “Masyumi” menang dengan perolehan

⁵⁹ Bunyi putusan tersebut adalah, “menjoesoaikan soesoenan dan sifat Masjoemi sebagai Poesat Persatoean Oemmat Islam, sehingga dapat mengerahkan dan memimpin perjoeangan Oemmat Islam Indonesia seluruhnja”. Lihat dalam *Kedaulatan Rakjat, loc cit*, 9 November 1945.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 329.

⁶¹ Soemarso Soemarsono, *loc cit*, hlm. 63.

suara yang tipis⁶² sehingga istilah itu yang pada akhirnya dipilih menjadi nama resmi dari partai politik Islam tersebut.

2.1.2. Susunan Awal Pengurus Besar Partai Masyumi

Salah satu resolusi yang dihasilkan Mukhtamar Umat Islam Indonesia adalah menjadikan Masyumi sebagai partai politik Islam tunggal di Indonesia. Harian *Kedaulatan Rakjat* yang terbit pada 9 November 1945, menerangkan bahwa yang ditunjuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Masyumi untuk pertama kalinya adalah Soekiman, Abikusno Tjokrosujoso, dan Wali Alfatah. Susunan pengurus tersebut dilengkapi hingga merepresentasikan keberagaman golongan umat Islam di Indonesia sebagai berikut:

Madjlis Sjoero (Dewan Partai)

Ketua Umum	: Kjai H. Hasyim Asj'ari
Ketua Moeda I	: Ki Bagoes Hadikoesoemo
Ketua Moeda II	: Kjai Wachid Hasjim
Ketua Moeda III	: Mr. Kasman Singodimedjo
Anggota	: R.H.M. Adnan
	: H.A. Salim
	: Kjai H. Abd. Wahab
	: Kjai H. Abd. Halim
	: Kjai H. A. Sanoesi
	: Sjech Djamil Djambek

Dan beberapa poeloeh Kjai serta pemoeka2 Islam lainnja.⁶³

Pengoeroes Besar

Ketua	: Dr. Soekiman
Ketua Moeda I	: Abikusno Tjokrosuejoso
Ketua Moeda II	: Wali Alfatah
Sekretaris I	: Harsono Tjokroaminoto
Sekretaris II	: Prawoto Mangkoesasmito
Bendahari	: Mr. R.A. Kasmat ⁶⁴

Pimpinan Bagian

Bagian Penerangan	: Wali Alfatah
	: A. Gaffar Ismail

⁶² Perbandingan suara saat itu adalah 52 dan 51. Remy Madinier, *op cit*, hlm. 67.

⁶³ PB. Masjoemi, *op cit*, hlm 3.

⁶⁴ *Ibid.*

Barisan Sabilillah dan Hizbullah	: Kjai H. Masjkoer : W. Wondoamiseno : H. Hasjim : Sulio Adikoesoemo
Bagian Keuangan	: Mr. R.A. Kasmat : R. Prawirojoewoeno : H. Abd. Hamid Bkn.
Bagian Pemuda	: Mhd. Mawardi : Harsono Tjokroaminoto ⁶⁵
Anggauta-anggauta	: K.H. M. Dachlan : H.M. Farid Ma'roef : Joenoes Anis : K.H. Faqih Osman : K.H. Fathoerrahman : Dr. Abu Hanifah : M. Natsir : S.M. Kartoesoewirjo : Anwar Tjokroaminoto : Mr. Sjamsoeddin : Mr. Moh. Roem ⁶⁶

Susunan Pengurus Besar Masyumi yang telah diuraikan sebelumnya menandakan bahwa sejak awal pembentukannya, Masyumi merefleksikan kekuatan umat Islam di Indonesia. K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, K.H. Abdul Wahid Hasyim, K.H. Masykur, K.H. M. Dahlan, dan K.H. Fathurrachman Kafrawi tercatat sebagai delegasi NU. Delegasi Muhammadiyah terlihat mendominasi susunan awal Pengurus Besar Masyumi, terdapat 11 orang Muhammadiyah yang namanya tercatat dalam susunan awal Pengurus Besar Masyumi. Mereka adalah Soekiman, Wali Alfatah, Prawoto Mangkusasmito, Mr. R.A. Kasmat, H.M. Faried Ma'roef, Joenoes Anis, K.H. Faqih Usman, Mr. Mohamad Roem, R. Prawirojuwono, H. Abdul Hamid Bkn.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

dan Moh. Mawardi.⁶⁷ Beberapa tokoh bekas aktivis PSII yang tercatat namanya sebagai bagian Pengurus Besar Masyumi, di antaranya adalah Abikusno Tjokrosujoso, Harsono Tjokroaminoto, S.M. Kartoesoewirjo, dan Anwar Tjokroaminoto.⁶⁸ Mohammad Natsir tercatat sebagai delegasi Persis yang menjadi anggota Pengurus Besar Masyumi.⁶⁹ K.H. Abdul Halim mewakili Perikatan Umat Islam dan K.H. A. Sanusi serta Mr. Sjamsoeddin dari Persatuan Umat Islam, ada pun A. Gaffar Ismail, masyhur dikenal sebagai bekas aktivis Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) selama era Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Susunan Pengurus Besar Masyumi terdiri atas dua badan yang memiliki status dan peran berbeda, yaitu Majelis Syura dan Pengurus Besar. Majelis Syura merupakan badan penasihat dan pemberi pertimbangan pada Pengurus Besar atau Pimpinan Partai,⁷⁰ sedangkan Pengurus Besar adalah badan eksekutif tertinggi yang bertugas untuk memimpin, melaksanakan, dan menentukan strategi perjuangan partai dalam batas-batas keputusan muktamar.⁷¹ Susunan awal Pengurus Besar Masyumi terdiri atas dua model figur umat Islam Indonesia, yaitu pemimpin agama (ulama) dengan pemimpin politik. K.H. Hasyim Asy'ari⁷² yang dipilih menjadi Ketua Umum Majelis Syura Masyumi merupakan seorang ulama

⁶⁷ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019, hlm. 158.

⁶⁸ Secara formal, PSII belum berdiri kembali setelah organisasi ini dilarang beraktivitas oleh Pemerintahan Militer Jepang

⁶⁹ Sebagaimana PSII, secara formal, Persis belum berdiri kembali.

⁷⁰ Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 123.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 122.

⁷² K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka di dalam sejarah Indonesia. Ia dilahirkan pada Selasa, 14 Februari 1871 di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Jombang. Hasyim Asy'ari merupakan putra dari seorang kiai terkemuka bernama K.H. Asy'ari perintis Pondok Pesantren Keras. Setelah menimba ilmu dari Tanah Suci Makkah, Hasyim Asy'ari merintis Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang. Lihat dalam Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm 34.

karismatik perintis NU lulusan pondok pesantren dan alumni Makkah Al-Mukarramah. Ia menjadi figur yang mewakili pemimpin agama. Soekiman yang dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar Masyumi menjadi figur yang mewakili pemimpin politik. Ia adalah lulusan Fakultas Kedokteran dari Universitas Amsterdam Belanda, yang juga kader Muhammadiyah,⁷³ bekas aktivis PSII, Ketua Partai Islam Indonesia (PII), dan aktivis Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.

2.1.3. Kiprah Partai Masyumi

Tujuan Masyumi berdasarkan Anggaran Dasar Masyumi 1945 pasal 2 terdiri atas dua butir yaitu, “menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan”⁷⁴. Redaksi kalimat tujuan Masyumi pada awalnya sarat akan kepentingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami karena suasana pada awal November 1945 sedang tidak kondusif, mengingat aktivitas Belanda dan Sekutu semakin intens di wilayah Indonesia. Redaksi kalimat tujuan Masyumi mengalami perubahan pada 1952. Rumusan tujuan partai yang pada awalnya sarat dengan kepentingan mempertahankan kedaulatan Indonesia diganti menjadi upaya Islamisasi berbagai sendi kehidupan rakyat Indonesia. Tujuan Masyumi berdasarkan Anggaran Dasar Masyumi 1952 adalah, “terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia, menuju keridlaan Ilahi.”⁷⁵

⁷³ Soekiman dibesarkan di bawah lingkungan Muhammadiyah. Ia pernah mengabdikan sebagai dokter di RS PKU Muhammadiyah pada 1927. Lihat dalam *ibid*, hlm. 53; Soekiman tercatat sebagai anggota PP. Muhammadiyah pada 1961. Lihat dalam Syaifullah, *op cit*, hlm. 159.

⁷⁴ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, *op cit*, hlm. 118.

⁷⁵ Yayasan Pembangunan Umat, *Fakta Dokumenta 2*, Jakarta: Yayasan Pembangunan Umat, 1984, hlm 29.

Masyumi dibentuk untuk menghimpun, mengerahkan, dan memimpin perjuangan umat Islam Indonesia, karena itu Masyumi memiliki dua jenis keanggotaan, yaitu keanggotaan perseorangan dan keanggotaan istimewa.⁷⁶ Keanggotaan perseorangan atau anggota biasa adalah warga negara Indonesia beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan⁷⁷ berusia minimal 18 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia tersebut.⁷⁸ Keanggotaan istimewa terdiri atas organisasi-organisasi Islam yang tidak bergerak di bidang politik.⁷⁹ Masyumi tercatat pernah memiliki 8 anggota istimewa yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).⁸⁰

Masyumi juga terlihat memanfaatkan struktur organisasi yang telah tersebar di berbagai daerah untuk menjadi basis pendukungnya. Cabang-cabang Masyumi yang tersebar di berbagai kabupaten, kecamatan, hingga pedesaan di Pulau Jawa dan Madura sejak era Pendudukan Jepang dipersiapkan untuk menjadi partai politik pada masa awal kemerdekaan.⁸¹ Laskar Hizbullah sebagai sayap militer umat Islam yang pada awalnya berada di bawah kendali Masyumi Jepang

⁷⁶ *Ibid.* hlm 30.

⁷⁷ Sekretariat Umum Masjumi, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Masjumi*. tanpa kota, tanpa penerbit, 1949, hlm. 1.

⁷⁸ Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 177.

⁷⁹ Sekretariat Umum Masjumi, *op cit*, hlm. 2

⁸⁰ Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 182-183.

⁸¹ Hal demikian terlihat dalam maklumat Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, yang menyatakan bahwa “Kemudian diseroekan kepada segenap tjabang dan ranting Masjoemi seloeroeh Djawa dan Madura, hendaknja selekas moengkin mempersiapkan langkah Masjoemi sebagai Partiy Politiek Islam jang sangat diharap-harapkan oleh oemmat Islam dan orang2 yang berkepentingan”. *Kedaulatan Rakjat*, 9 November, *loc cit*.

juga turut dimasukkan ke dalam struktur Masyumi.⁸² Sifat Masyumi yang demikian itu, menurut Kahin, membuat Masyumi dapat menghimpun jumlah massa yang besar meskipun dalam praktiknya tidak terpadu dan tidak terorganisasi dengan baik.⁸³

Masyumi menjadi partai yang beroposisi terhadap pemerintahan pada kurun waktu 1946-1947.⁸⁴ Masyumi di bawah kepemimpinan Soekiman menjadi oposisi Perdana Menteri Sjahrir dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Masyumi menentang segala bentuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Perjanjian Renville yang dilakukan oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin ditolak oleh Masyumi. Kedua perjanjian tersebut ditolak karena dinilai merugikan perjuangan bangsa Indonesia,⁸⁵ sekali pun demikian, Soekiman tetap memperkenankan kader-kadernya bergabung ke dalam dua kabinet tersebut tetapi tidak atas nama partai, melainkan atas nama pribadi. Kader-kader Masyumi yang masuk ke dalam Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir Sjarifuddin adalah H.M. Rasjidi, Mohammad Natsir, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, K.H. Fathurrachman Kafrawi, Soekiman, Mr. Mohamad Roem, Mr. Sjamsoeddin, Mr. Jusuf Wibisono, K.H. Masykur, dan Mr. Kasman Singodimedjo.

⁸² Hizbullah adalah sayap militer umat Islam semacam PETA yang dibentuk pada era Pendudukan Jepang dan menjadi bagian dari federasi Masyumi saat itu. Hizbullah tetap dipertahankan sebagai anak organisasi Masyumi pasca kemerdekaan Indonesia.

⁸³ Lihat dalam George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2022, hlm. 193.

⁸⁴ Remy Madinier, *op cit*, hlm. 75.

⁸⁵ Lihat dalam tulisan Naufal Al-Zahra, *Memori Indah Persatuan Umat Islam Indonesia*, majalah *Risalah* No. 08, 2022, hlm. 80.

Sebagian kecil kader Masyumi yang bergabung ke dalam kabinet selama kurun waktu 1946-1949 muncul menjadi patriot-patriot yang tangguh. Mereka menjalankan peranan penting selama masa krisis tersebut. Terdapat tiga orang kader Masyumi yang memiliki karir cemerlang selama kurun waktu 1946-1949, mereka yaitu Mohammad Natsir,⁸⁶ Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan Mr. Mohamad Roem. Natsir dikenal sebagai Menteri Penerangan yang aktif memimpin perjuangan bangsa Indonesia bersama Sukarno dan Mohammad Hatta. Ia dipercaya menjadi Menteri Penerangan yang bertugas memberikan kabar dan maklumat pemerintah Indonesia ihwal perjuangan kepada segenap rakyat Indonesia. Ia dipercaya menjadi Menteri Penerangan selama tiga kali yaitu pada Kabinet Sjahrir II, III, dan Kabinet Hatta.

Mr. Sjafruddin Prawiranegara⁸⁷ merupakan kader Masyumi yang berjasa dalam menentukan nasib masa depan Indonesia. Ia masyhur dikenal sebagai penyelamat Indonesia. Sjafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada akhir 1948 ketika pemimpin-pemimpin Republik ditawan dan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota Indonesia dikuasai Belanda. Status Sjafruddin saat itu apabila ditinjau secara legal-formal adalah kepala negara dan pemerintahan Indonesia, akan tetapi

⁸⁶ Pada bagian selanjutnya Mohammad Natsir akan disebut Natsir.

⁸⁷ Pada bagian selanjutnya Sjafruddin Prawiranegara akan disebut Sjafruddin; Sjafruddin Prawiranegara merupakan salah seorang pimpinan Masyumi. Ia dilahirkan di Banten pada 28 Februari 1911 dari pasangan Rd. Arsjad Prawiraatmadja dan Noer'aini. Saat menjadi pelajar, Sjafruddin tidak melibatkan diri dalam kegiatan mahasiswa Islam seperti JIB atau pun SIS, ketika itu ia lebih tertarik dengan kegiatan mahasiswa sosialis. Ia bergabung dengan Masyumi setelah aktif menjadi anggota BP KNIP. Sjafruddin, pernah menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Sjahrir II dan III, Kabinet Hatta, serta Kabinet Natsir. Ia juga merupakan satu-satunya Presiden De Javasche Bank dari kalangan bumiputra dan didaulat menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang pertama. Selengkapnya lihat dalam Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.

dengan segala kerendahan hatinya, ia tidak ingin menggunakan gelar Presiden PDRI.⁸⁸ Ia hanya berkenan menggunakan istilah jabatan Ketua PDRI selama masa kritis melanda tanah airnya.⁸⁹ Tanpa inisiatif dan usaha Sjafruddin mungkin Indonesia akan menghilang dari peta dunia selama beberapa tahun.

Mr. Mohamad Roem⁹⁰ menjadi kader Masyumi yang melengkapi usaha Sjafruddin. Ia berperan penting dalam usaha pengembalian para pemimpin Republik ke Yogyakarta. Murid kesayangan Haji Agus Salim ini menjadi pimpinan delegasi diplomat Indonesia, sementara pimpinan delegasi diplomat Belanda bernama Van Roijen. Perundingan antara kedua delegasi diplomat tersebut digelar di Hotel Des Indes, Jakarta pada 14 April-7 Mei 1949⁹¹. Nama kedua pimpinan delegasi diplomat Indonesia dan Belanda itu diabadikan sebagai nama resmi dokumen hasil perundingan tersebut, yaitu Perjanjian Roem-Van Roijen.⁹² Salah satu dampak perjanjian Roem-Van Roijen adalah mempercepat pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berimplikasi pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah negara federasi Indonesia yang riwayatnya tidak begitu panjang. RIS bubar setelah Natsir, selaku Pemimpin

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 184.

⁸⁹ *Ibid*.

⁹⁰ Pada bagian selanjutnya Mohamad Roem akan disebut Roem; Mohammad Roem dilahirkan dari pasangan Dulkarnaen Djojosasmito dan Siti Tarbijah di Temanggung, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1908. Ia merupakan salah seorang politisi Masyumi yang memiliki karir cemerlang. Sejak belia Roem aktif dalam Sarekat Islam (SI) bersama dengan Haji Agus Salim. Roem mengikuti jejak Haji Agus Salim ketika dirinya keluar dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Roem bersama gurunya merintis organisasi Gerakan Penjadar. Roem juga bergabung dengan Jong Islamieten Bond (JIB). Roem pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Roem-Idham. Selengkapnya lihat dalam S. Soemarsono, *Mohamad Roem 70 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 153-154.

⁹² *Ibid*, hlm. 154.

Fraksi Masyumi, menyampaikan Mosi Integral di Parlemen RIS pada 3 April 1950.⁹³

Pemimpin pemerintahan Indonesia pada kurun waktu 1945-1947 didominasi oleh orang-orang sosialis. Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi figur yang memiliki pengaruh besar dalam setiap arah kebijakan pemerintahan selama masa tersebut. Kedua orang itu dikenal sebagai tokoh-tokoh sosialis terkemuka.⁹⁴ Orientasi dan corak ideologi kepala pemerintahan Indonesia nampak mulai berubah memasuki 1950-an. Masyumi sebagai partai Islam mulai diberikan kesempatan untuk memimpin pemerintahan pada 1950-an.

Kader Masyumi perdana yang dipercaya menjadi kepala pemerintahan Indonesia adalah Natsir (1950-1951).⁹⁵ Natsir yang pada saat itu telah didaulat menjadi Ketua Umum Masyumi dalam Muktamar Masyumi ke-IV di Yogyakarta pada 1949, diberi kepercayaan oleh Presiden Sukarno untuk menjadi Perdana Menteri. Posisi Natsir sebagai Ketua Umum Masyumi sementara waktu digantikan oleh Mr. Jusuf Wibisono. Natsir mendapatkan kepercayaan dari Presiden Sukarno karena sebelumnya ia berhasil mencetuskan sebuah konsepsi

⁹³ Mosi Integral yang dicetuskan Natsir didukung fraksi-fraksi lain seperti PNI, PKI, PSII, Parkindo, Perti, dan Partai Katolik. Mosi tersebut ditandatangani oleh Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir. Sakirman, K. Werdojo, A.M. Tambunan, Amelz, Tjokronegoro, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Moch. Tauchid, dan Siradjuddin Abbas. Lihat dalam M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010, hlm. 67.

⁹⁴ Dua orang tersebut aktif membangun perlawanan bawah tanah selama era Pendudukan Jepang. Kedua orang tersebut sama-sama membenci fasisme Jepang. Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibentuk pada awal Desember 1945, merupakan hasil peleburan Partai Sosialis rintisan Amir Sjarifuddin dengan Partai Rakyat Sosialis rintisan Sutan Sjahrir. Selengkapnya lihat dalam George McTurnan Kahin, *op cit*, hlm. 194.

⁹⁵ *Ibid.*

negara kesatuan yang terkenal dengan Mosi Integral di Parlemen RIS.⁹⁶ Mosi yang dicetuskan Natsir di parlemen turut berkontribusi dalam mengubah bentuk negara Indonesia yang semula federasi menjadi negara kesatuan. Kabinet Natsir rupanya bertahan lama, kabinet yang tidak didukung PNI itu hanya mampu bekerja selama kira-kira 8 bulan.

Kiprah Masyumi sebagai partai pemerintah kemudian dilanjutkan oleh Soekiman (1951-1952).⁹⁷ Ia mampu memimpin kabinet selama setahun. Masyumi kembali dipercaya memimpin kabinet pasca Kabinet Soekiman jatuh. Masyumi menjadikan salah seorang kadernya, Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Perdana Menteri mendampingi Wilopo dari PNI. Masyumi sempat menjadi partai oposisi pemerintahan ketika Ali Sastroamidjojo dari PNI menjadi Perdana Menteri. Masyumi menjadi oposisi Kabinet Ali I selama 2 tahun. Masyumi kembali menjadi partai pemerintah ketika Mr. Burhanuddin Harahap⁹⁸ (1955-1956), salah seorang kader Masyumi, dipercaya menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo.

Masyumi merupakan partai besar pada 1950-an. Kebesaran Masyumi nampak dalam hasil Pemilihan Umum 1955. Masyumi meraih suara cukup besar baik untuk anggota DPR maupun Konstituante dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Masyumi meraih total perolehan suara untuk anggota DPR sebanyak 7.903.886⁹⁹ sedangkan untuk anggota Konstituante diperoleh suara sebanyak

⁹⁶ Dzulfikriddin, *op cit*, hlm.71; Tim Buku Tempo, *Natsir Politik Santun di antara Dua Rezim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011, hlm. 42-43.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Pada bagian selanjutnya Mr. Burhanuddin Harahap akan disebut Burhanuddin.

⁹⁹ Mudanto Pamungkas, Abdul Cholik, Dewi Mayangsari, dkk. *loc cit*, hlm 142.

7.789.619.¹⁰⁰ Perolehan suara sebesar itu mengantarkan Masyumi duduk di posisi kedua, di bawah perolehan suara PNI dan di atas perolehan suara NU serta PKI yang terkenal menjadi musuh bebuyutan Masyumi.

Masyumi semakin lemah menjelang 1960-an. Keterlibatan Natsir, Sjafruddin, dan Burhanuddin dalam gerakan PRRI di Sumatra menyebabkan Masyumi berada di titik nadir. Presiden Sukarno menganggap keterlibatan elite Masyumi dalam gerakan PRRI sebagai bentuk dukungan partai terhadap gerakan tersebut. Presiden Sukarno lalu membubarkan Masyumi pada 17 Agustus 1960.

2.2. Profil Nahdlatul Ulama

NU adalah organisasi terbesar di Indonesia. NU pada awalnya bukanlah organisasi politik, melainkan sebuah organisasi sosial keagamaan yang menghimpun potensi sumber daya umat Islam di Hindia Belanda. Kemunculan NU sebagai organisasi sosial keagamaan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang sedang berlangsung pada masanya. Kehadiran NU merupakan antitesis dari munculnya berbagai gerakan organisasi Islam modern di Hindia Belanda¹⁰¹ serta dampak dari dinamika geopolitik Timur Tengah yang cukup bergolak pada paruh kedua abad ke-20.

Aktivitas sejumlah organisasi Islam modern yang aktif melebarkan pengaruhnya ke sejumlah kawasan di Pulau Jawa, khususnya ke pelosok Jawa

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 145.

¹⁰¹ Organisasi ini mencakup organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik. Organisasi Islam modern pada umumnya adalah organisasi yang tidak terikat oleh salah satu pemahaman dan praktik empat imam mazhab. Para aktivis organisasi Islam modern juga cenderung menafsirkan Al-Quran dan hadis secara kontekstual, sehingga mereka lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Beberapa organisasi Islam yang termasuk pada golongan organisasi modern adalah Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Sarekat Islam (SI). Selengkapnya mengenai profil dan gerakan organisasi Islam modern dapat dilihat dalam Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982

Tengah dan Jawa Timur cukup memengaruhi solidaritas kaum ulama dan para pengikutnya. Para aktivis organisasi Islam modern cukup sukses merekrut para pedagang dan tuan tanah yang selama itu menjadi pendukung aktivitas para ulama tradisional.¹⁰² Melemahnya kekuasaan Syarif Husain di Hijaz yang disebabkan oleh pergerakan masif Ibnu Saud pada paruh kedua abad ke-20 juga merupakan hal yang sangat berpengaruh dan berdampak secara langsung atas kebangkitan para ulama tradisional di Hindia Belanda. Mereka menganggap pergerakan Ibnu Saud sebagai bentuk ancaman bagi para ulama dan umat Islam yang masih mempertahankan ritus-ritus keagamaan lama berbasis mazhab.¹⁰³

Hubungan antara aktivis organisasi Islam modern dengan para ulama tradisional pada awalnya berlangsung dengan baik pada awal abad ke-20. Mereka biasa menggelar sejumlah pertemuan untuk membahas isu-isu yang beredar baik di dunia Islam maupun Hindia Belanda. Hubungan mereka mulai kurang harmonis memasuki paruh kedua abad ke-20, seiring dengan munculnya tuduhan-tuduhan dari kedua belah pihak. Keretakan hubungan tersebut terlihat dalam Kongres Al-Islam pertama yang diselenggarakan di Cirebon pada 31 Oktober-2 November 1922.¹⁰⁴ Sejumlah pemuka dari organisasi Islam modern berdebat cukup sengit dengan kalangan ulama tradisional mengenai perbedaan pandangan sistem pendidikan Islam serta status Al-Quran dan hadis dalam pelaksanaan kongres itu.

¹⁰² Ulama-ulama tradisional yang dimaksud di sini adalah para pemuka Islam yang tetap mempertahankan pemahaman dan praktik empat imam mazhab, terutama mazhab Syafii. Greg Fealy, *op cit*, hlm. 31

¹⁰³ Deliar Noer, *op cit*, hlm. 247.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 247.

Kongres Al-Islam yang pada awalnya ditujukan sebagai ajang untuk merekatkan persatuan umat Islam di Hindia Belanda, berubah menjadi ajang perdebatan sengit antara kelompok modern dan tradisional. Pelaksanaan Kongres Al-Islam seterusnya cukup mampu untuk meredakan pertikaian antara kedua kelompok tersebut, akan tetapi, tidak berlangsung lama. Keharmonisan itu terbangun kembali setelah semua kelompok tertarik untuk membicarakan persoalan kekhalifahan Islam yang telah dihapus oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1924. Umat Islam di Hindia Belanda bersepakat membentuk Komite Khilafat, sebagai badan yang mengurus persoalan kekhalifahan Islam, pada 4 Oktober 1924.¹⁰⁵ Badan ini diketuai oleh Wondoamiseno dari Sarekat Islam dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah¹⁰⁶ sebagai wakilnya.¹⁰⁷

Pelaksanaan Kongres Al-Islam ketiga di Surabaya pada 24-26 Desember 1924 memutuskan untuk mengirimkan tiga orang delegasi pada Kongres Dunia Islam di Kairo untuk membicarakan nasib kekhalifahan Islam. Ketiga orang delegasi tersebut adalah Surjopranoto dari SI, K.H. Mas Mansoer dari Muhammadiyah, sementara, K.H. Wahab Chasbullah dari kalangan ulama tradisional, akan tetapi, pelaksanaan kongres di Kairo tersebut ditunda.¹⁰⁸ Perhatian umat Islam di Hindia Belanda terhadap masalah kekhalifahan Islam rupanya belum surut. Mereka mengalihkan perhatiannya pada perkembangan geopolitik di Hijaz yang sedang berkecamuk akibat konflik antara Syarif Husein dengan Ibnu Saud.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁰⁶ Pada bagian selanjutnya K.H. Abdul Wahab Chasbullah akan disebut K.H. Wahab Chasbullah.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta pada 21-27 Agustus 1925, mulai membicarakan agenda yang berkaitan dengan undangan Kongres Dunia Islam dari Raja Ibnu Saud yang telah mengalahkan Syarif Husein.¹⁰⁹ Pembicaraan mengenai agenda undangan dari penguasa baru Hijaz itu masih berlangsung sampai pelaksanaan Kongres Al-Islam kelima di Bandung pada 6 Februari 1926. Kedua kongres itu dapat dipandang sebagai titik balik hubungan antara aktivis organisasi Islam modern dengan kalangan ulama tradisional di Hindia Belanda. Wakil aktivis organisasi modern mulai kembali memperlihatkan sikap yang meremehkan wakil ulama tradisional dalam dua kongres tersebut, bahkan, sebelum pelaksanaan Kongres Al-Islam kelima di Bandung, beberapa tokoh organisasi Islam modern telah menggelar rapat di Cianjur pada 8-10 Januari 1926.¹¹⁰ Rapat tersebut memutuskan Tjokroaminoto dari SI dan K.H. Mas Mansoer dari Muhammadiyah untuk mengikuti Kongres Dunia Islam yang diinisiasi oleh Raja Ibnu Saud.¹¹¹ K.H. Wahab Chasbullah mencoba mengajukan usul dalam Kongres Al-Islam yang kelima. Ia menyampaikan usul untuk disampaikan kepada Raja Ibnu Saud supaya menghormati dan menjamin praktik peribadatan umat Islam yang berpegang teguh pada pemahaman mazhab, akan tetapi kongres tidak menyambut dengan baik usul tersebut, sebagai respons atas hal itu K.H. Wahab Chasbullah bersama beberapa orang dari kalangan ulama tradisional menyatakan mundur dari Kongres Al-Islam dan Komite Khilafat.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 243

¹¹⁰ *Ibid*.

¹¹¹ *Ibid*.

2.2.1. Pembentukan Nahdlatul Ulama

Pengaruh modernisme Islam di Hindia Belanda tidak hanya berdampak pada kemunculan kelompok-kelompok Islam modern, melainkan turut memengaruhi kemunculan sejumlah kelompok Islam tradisional. Modernisme ditanggapi oleh umat Islam di Hindia Belanda setidaknya dengan dua cara, ada yang menerimanya secara komprehensif dan ada pula yang mengadopsinya secara parsial. Sebagian pengikut aliran Islam tradisional ada yang mengadopsi ide modernisme dalam bidang pendidikan maupun organisasi. NU sendiri termasuk pada kelompok yang mengadopsi gagasan modern dalam bidang organisasi.

Beberapa tahun sebelum NU dibentuk, terdapat sejumlah organisasi Islam yang dirintis oleh ulama-ulama tradisional, khususnya di Pulau Jawa. Beberapa organisasi Islam yang muncul pada awal abad ke-20 tidak hanya dirintis oleh para aktivis Islam modern, melainkan dinisiasi juga oleh sejumlah ulama tradisional. Organisasi-organisasi tersebut di antaranya adalah Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Nahdlatul Tujjar. Tashwirul Afkar merupakan sebuah kelompok studi yang dirintis oleh K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Achmad Dachlan Achyad dari Kebondalem pada 1918.¹¹² Kelompok tersebut ditujukan sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai berbagai isu aktual, termasuk di antaranya mengenai tren modernisme di dunia Islam.

Nahdlatul Wathan adalah organisasi lain yang dirintis oleh ulama tradisional. Nahdlatul Wathan adalah organisasi yang berafiliasi pada lembaga pendidikan. Nahdlatul Wathan sendiri sebenarnya adalah nama sekolah modern

¹¹² Greg Fealy, *op cit*, hlm. 30.

yang dibentuk oleh K.H. Wahab Chasbullah bersama dengan K.H. Mas Mansoer yang beberapa tahun berikutnya bergabung dengan Muhammadiyah.¹¹³ Nahdlatul Wathan dibentuk di Surabaya pada 1916.¹¹⁴ Nahdlatul Wathan tercatat sebagai perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan dan mempunyai staf pengajar yang terdiri atas sebagian kiai perintis NU, di antaranya adalah K.H. Bisri Syansuri, K.H. Abdul Hakim Leuwimunding, dan K.H. Abdullah Ubaid.¹¹⁵ Greg Fealy menyatakan, dibandingkan organisasi yang dirintis oleh ulama tradisional lainnya sebelum NU, Nahdlatul Wathan merupakan organisasi yang perkembangannya cukup menggembirakan karena dikabarkan sempat membuka beberapa cabang di Pulau Jawa.

Nahdlatul Tujjar menjadi salah satu organisasi yang diinisiasi oleh ulama tradisional. Nahdlatul Tujjar dibentuk oleh K.H. Wahab Chasbullah pada 1918. Ia membentuk organisasi ini bersama gurunya, K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama karismatik dari Jombang, Jawa Timur.¹¹⁶ Sebagaimana nama organisasinya yang mempunyai makna kebangkitan perniagaan, organisasi ini bergerak dalam bidang pengembangan perniagaan atau perekonomian umat Islam di daerah Surabaya, Jombang, dan Kediri. Komoditas yang dijual belikan Nahdlatul Tujjar di antaranya adalah kebutuhan pokok hasil pertanian dan perkebunan seperti sayuran, gula, buah-buahan, kopi, minyak goreng dan sabun.¹¹⁷ Sayangnya,

¹¹³ *Ibid*, hlm 29.

¹¹⁴ *Ibid*.

¹¹⁵ *Ibid*.

¹¹⁶ *Ibid*. hlm. 30

¹¹⁷ Asyari Hasan, Nadhil Novarel Mathari, "Penerapan Koperasi Menurut K.H. Abdul Wahab Chasbullah", *Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 7, No.1, hlm. 84.

riwayat organisasi ini tidak begitu populer dan diduga hanya bertahan sebentar saja.

Nama K.H. Wahab Chasbullah yang muncul dalam perintisan tiga organisasi di atas menandakan kepiawaiannya dalam berorganisasi. Ia sendiri adalah sosok ulama yang sangat terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penguasaan keilmuan K.H. Wahab Chasbullah tidak terbatas pada urusan-urusan agama saja, melainkan meliputi hal-hal kontemporer.¹¹⁸ Ia dikenal sebagai santri yang pernah menimba ilmu di sejumlah pesantren juga menjadi murid para syaikh di Makkah, sehingga ia dikenal sebagai santri kelana.¹¹⁹ K.H. Wahab Chasbullah merupakan sosok di balik hadirnya ide pembentukan NU. Ia dikenang sebagai perintis tradisi intelektual NU, pasca NU berhasil dibentuk.

Situasi geopolitik Timur Tengah yang bergejolak memasuki paruh kedua abad ke-20, mendorong sejumlah ulama di Pulau Jawa bersatu membentuk sebuah perkumpulan. Perkumpulan tersebut ditugaskan untuk menjadi wadah penyalur aspirasi umat Islam tradisional dari Hindia Belanda kepada Ibnu Saud yang telah berhasil menguasai Hijaz. Badan yang dimaksud ini adalah Komite Hijaz yang didukung oleh beberapa ulama terkemuka di Pulau Jawa. Salah satu ulama yang tergabung dalam komite tersebut adalah K.H. Wahab Chasbullah.¹²⁰ Ia

¹¹⁸ Saifullah Ma'shum (ed), *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998, hlm. 143.

¹¹⁹ K.H. Abdul Wahab Chasbullah atau akrab dipanggil Kiai Wahab dilahirkan dari pasangan Kiai Chasbullah dan Nyai Lathifah pada 1887. Kiai Wahab sebagaimana santri lainnya menimba ilmu di beberapa pondok pesantren, di antaranya pernah menjadi santri Kiai Kholil Bangkalan di Madura dan K.H. Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang, serta murid sejumlah syaikh di Makkah. Lihat dalam Choiril Anam, *KH Abdul Wahab Chasbullah Hidup dan Perjuangannya*. Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2017, hlm. 95-96.

¹²⁰ Potret wajah K.H. Wahab Chasbullah dapat dilihat dalam lampiran 4.

sebelumnya keluar dari Komite Khilafat, sebuah badan yang isinya terdiri atas para pemuka Islam, terutama dari SI dan Muhammadiyah.

Kekecewaan ulama tradisional yang kedudukannya tersisihkan oleh kalangan aktivis Islam modern dalam Komite Khilafat menjadi sebab yang secara langsung membangkitkan *ghirah* para ulama untuk membentuk sebuah organisasi untuk menghimpun potensi kekuatan mereka. Komite Hijaz yang dibentuk oleh sejumlah ulama tradisional di Pulau Jawa menjadi cikal bakal NU. Sebuah rapat Komite Hijaz di Surabaya pada 31 Januari 1926 memutuskan untuk mengirimkan delegasi dalam Kongres Dunia Islam di Makkah dan membentuk sebuah organisasi bagi para ulama. Pertemuan tersebut dihadiri oleh K.H. Hasyim Asyari,¹²¹ K.H. Bisri, K.H. Riduan, K.H. Nawawi, K.H. R. Asnawi, K.H. R. Hambali, K. Nachrawi, dan K.H. Doro Muntaha. Atas usul dari K.H. M. Alwi Abdul Azis, organisasi tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama¹²², sedangkan mengenai resolusi untuk mengirimkan delegasi tersebut urung dilaksanakan karena terlambat memesan tiket kapal laut. Resolusi tersebut direalisasikan oleh NU dengan mengirimkan K.H. Wahab Chasbullah dan Ustadz Ahmad Ghanaim untuk bertemu Raja Ibnu Saud pada 13 Juli 1928.¹²³

2.2.2. Susunan Awal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Rapat Komite Hijaz di Surabaya pada 31 Januari 1926 memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat mengakomodasi kepentingan para ulama berikut juga dengan umat Islam yang berpegang teguh pada praktik-praktik bermazhab. Susunan awal Pengurus Besar NU terlacak dalam *Statuten*

¹²¹ Lukisan wajah K.H. Hasyim Asy'ari dapat dilihat dalam lampiran 3.

¹²² Aboebakar, *op cit*, hlm 538.

¹²³ Deliar Noer, *op cit*, hlm. 245.

Perkoempoelan Nahdlatol Oelama.¹²⁴ Berikut ini adalah susunan Pengurus Besar

NU pada masa awal pembentukannya:

Rois	: Kjahi Hadji Moehammad Hasjim bin As'ari
Wakiloerois	: Kjahi Hadji Sa'id bin Saleh
Katib	: Kjahi Hadji Mas Alwi bin Abdul Azis
A'wan	: Kjahi Abdullah bin Ali
President	: Hadji Hasan Gipo
Vice President	: Hadji Ahdjab
Bendahara	: Hadji Ihsan
Sekretaris	: Moehammad Sadiq alias Soegeng Yudhawijaya
Komisaris	: Hadji Saleh Djamil ¹²⁵

Susunan awal Pengurus Besar NU di atas menunjukkan bahwa terdapat dua hierarki pimpinan dalam sebuah kepengurusan. K.H. Hasyim Asyari yang masyhur dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur didaulat sebagai Rois atau pimpinan tertinggi Syuriah PBNU, sementara, Haji Hasan Gipo menempati posisi sebagai Presiden PBNU yang maknanya dalam hal ini bertugas sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU. Ia dikenal sebagai pedagang kelontong dan rokok yang mahir membaca dan menulis.¹²⁶

2.2.3. Kiprah Nahdlatul Ulama

NU yang dibentuk dalam sebuah pertemuan Komite Hijaz pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa dengan organisasi-organisasi Islam modern. NU memiliki cita-cita untuk memajukan taraf kehidupan umat Islam. Hal yang membedakan NU dengan organisasi Islam modern terletak pada komitmen NU

¹²⁴ Statuta NU ini diajukan oleh K.H. Said bin Saleh, Haji Hasan Gipo, dan Soegeng Yudhawijaya pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai lampiran administrasi untuk kepentingan permohonan badan hukum organisasi. Statuta ini dapat diterima dan badan hukum untuk NU turun pada 6 Februari 1930; tampilan statuta pertama NU dapat dilihat dalam lampiran 5.

¹²⁵ Istilah "Presiden" maupun "Wakil Presiden" untuk jabatan pimpinan eksekutif NU sesuai dengan redaksi kata yang digunakan dalam statuta. Lihat dalam PBNO, *Statuten Perkoempoelan Nahdlatol Oelama*, tanpa kota, tanpa penerbit, 1926, hlm. 6.

¹²⁶ Saifullah Ma'shum (ed), *op cit*, hlm. 52.

untuk tetap memelihara praktik bermazhab dan tradisi intelektual Islam yang berpegang teguh pada referensi ulama-ulama abad pertengahan. Hal tersebut nampak jelas dalam redaksi tujuan awal dibentuknya NU seperti yang telah dikutip di bawah ini:

“Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe,,Memegang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja Imam ampat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjafi-i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe’man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan Agama Islam.”¹²⁷

NU berkomitmen untuk mempertahankan paham keagamaan dan ritus-ritus lama ajaran Islam berbasis mazhab, mengadopsi paham keagamaan *Ahlussunnah wal jamaah* atau yang lebih populer dengan akronim *Aswaja*. Paham *Ahlussunnah wal jamaah* yang diadopsi NU terdiri, bila diuraikan secara rinci terdiri atas tiga aspek. Pertama, NU menganut akidah *Ahlussunnah wal jamaah* Asy’ariyah dan Maturidiyah yang dicetuskan Imam oleh Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang hidup pada abad pertengahan.¹²⁸ Kedua, NU menyatakan dirinya mengikuti doktrin empat mazhab dalam Islam yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali,¹²⁹ walaupun sebenarnya dalam tataran praktis, NU sangat dominan mengikuti mazhab Syafii.¹³⁰ Ketiga, NU menjalankan praktik tasawuf dengan mengikuti jalan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.¹³¹ Terminologi *Aswaja* tersebut digunakan NU sebagai identitas mereka,

¹²⁷ PBNO, *op cit*, hlm. 1.

¹²⁸ Mujamil Qomar, Implementasi Aswaja dalam Perspektif NU di Tengah Kehidupan Masyarakat, *Kontemplasi*, Vol 02, No. 01, 2014, hlm. 169.

¹²⁹ *Ibid*.

¹³⁰ Watak mazhab Syafii yang moderat menjadi alasan dipilihnya mazhab tersebut oleh kalangan NU. Hal tersebut relevan dengan karakter umat Islam di Indonesia yang akomodatif atas berbagai pengaruh kebudayaan. *Ibid*, hlm. 172-173.

¹³¹ *Ibid*, hlm 169.

dengan begitu ia menyatakan dirinya berbeda dari organisasi-organisasi Islam modern yang di antaranya mengklaim tidak mengikuti mazhab imam tertentu.

NU memberikan dua syarat bagi orang-orang yang berkeinginan menjadi anggotanya. NU menyatakan bahwa yang diperbolehkan menjadi anggota NU adalah orang Islam dan bermazhab. Rumusan mengenai syarat keanggotaan NU tersebut telah diatur dalam statuta awal NU dengan redaksi sebagai berikut, “jangan boleh menjadi anggota-anggotanya ini perkoempoelan jaitoe hanya orang yang beragama Islam yang bermazhab sebagai tersebut dalam futsal 2”.¹³² Syarat bermazhab yang ditetapkan oleh NU merupakan respons organisasi tersebut atas pengaruh wacana non-mazhab yang disuarakan oleh beberapa organisasi Islam modern pada awal abad ke-20. Syarat keanggotaan tersebut diperjelas dengan adanya dua jenis keanggotaan, yaitu anggota yang terdiri atas guru agama (ulama) dan anggota bukan guru agama.¹³³

Syarat keanggotaan guru agama yang diberlakukan NU dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan organisasi tersebut terhadap otoritas kepemimpinan ulama. NU memandang ulama bukan hanya sebagai guru agama melainkan juga pewaris para nabi. Salah satu motif pembentukan NU juga ditujukan untuk membangkitkan marwah para ulama dalam menghadapi arus gerakan Islam modern yang egaliter dan cenderung tidak menempatkan ulama pada kedudukan tertinggi. NU yang menjadikan otoritas kepemimpinan ulama sebagai salah satu prinsipnya menyebabkan roda organisasi tersebut dijalankan secara aktif oleh kaum ulama.

¹³² PBNO, *op cit*, hlm. 3

¹³³ *Ibid.*

NU sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki beberapa usaha atau program yang ditujukan untuk membangun taraf kehidupan umat Islam. Selengkapnya mengenai usaha-usaha NU dapat dilihat melalui uraian di bawah ini:

1. Mengadakan perhoeboengan di antara Oelama-Oelama jang bermadzhab terseboet dalam fatsal 2.
2. Memeriksa kitab-kitab sebeloenja dipkai oentoek mengadjar soepaja di ketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal Djama'ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid'ah.
3. Menjiarkan Agama Islam di atas madzhab sebagai tersboet dalam fatsal 2 dengan djalanan apa sadja jang baik.
4. Berichtiar memperbanjakkann Madrasah-Madrasah jang berdasar Agama Islam.
5. Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid², langgar² dan pondok² begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin.
6. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan jang tiada di larang oleh sjara' Agama Islam.¹³⁴

Greg Fealy menyatakan NU tumbuh dengan pesat pada kurun waktu 15 tahun awal pembentukannya. Perkembangan NU dari waktu ke waktu menunjukkan pencapaian yang cukup memuaskan. Sekaitannya dengan jumlah massa NU, walaupun nampaknya sulit untuk diverifikasi, Fealy mencatat bahwa NU sudah memiliki 40.000 anggota pada 1933. Ia mencatat, dalam dua tahun berikutnya, sudah terdapat 67.000 orang yang menjadi anggota NU di 76 cabang. Pada 1938, ia mencatat sudah terdapat 99 cabang NU dengan jumlah anggota sebanyak 100.000 dan NU tercatat sudah memiliki 120 cabang pada 1942. Jumlah massa sebesar itu, pada umumnya, anggota NU terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur dan Madura. Anggota NU juga dapat dijumpai di pesisir

¹³⁴ *Ibid*, hlm 2-3.

utara Jawa Tengah, wilayah Banten dan Cirebon. Ada pun, untuk di luar Jawa, anggota NU biasanya terdapat di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan, kawasan Batak Mandailing, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian kecil wilayah Sulawesi Selatan.¹³⁵

Progresifitas NU juga mulai nampak pada bidang-bidang lainnya memasuki 1930-an. NU membentuk sebuah lembaga wakaf bernama Lajnah Waqfiah pada 1930,¹³⁶ selain itu pada dekade tersebut pula NU merintis sebuah koperasi yang dinilai relatif berhasil dalam meraih keuntungan dan memiliki jangkauan pengaruh yang luas. Koperasi tersebut adalah Syirkah Muawwanah yang didirikan pada 1937.¹³⁷ Lembaga ini pada prinsipnya memperdagangkan berbagai komoditas yang laku di pasaran seperti hasil tani, hasil laut, rokok, sabun, dan batik. Syirkah Muawwanah ini berkontribusi cukup besar bagi pemasukan cabang-cabang maupun anggota NU.

Perhatian NU dalam bidang kepemudaan juga nampak pada 1930-an. Saat itu, telah muncul sejumlah kiai muda yang menjadi cikal bakal generasi kedua NU. Beberapa kiai tersebut di antaranya adalah Kiai Wahid Hasyim putra K.H. Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Ubaid, dan Kiai Machfoedz Siddiq. Greg Fealy menyatakan bahwa ketiga kiai muda tersebut memiliki hubungan yang baik dengan PBNU. Atas dukungan K.H. Wahab Chasbullah, PBNU secara resmi mulai mengakui keberadaan sayap organisasi kepemudaan NU yang dikenal dengan nama Pemuda Anshor dalam Mukhtamar NU yang digelar pada 1934.¹³⁸

¹³⁵ Greg Fealy, *op cit*, hlm 39.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 42.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 41.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 43.

NU juga turut aktif mengembangkan kegiatan pers layaknya organisasi-organisasi Islam modern seperti Persis dan Muhammadiyah yang telah merintis aktivitas penerbitan. NU menggunakan penerbitan sebagai sarana perluasan dakwah dan propaganda untuk kepentingan umat Islam. Beberapa terbitan NU adalah *Swara Nahdlatol Oelama*, *Oetoesan Nahdlatol Oelama*, dan *Berita Nahdlatol Oelama* yang dicetak oleh NU Surabaya.¹³⁹ Ketiga terbitan tersebut menggunakan bahasa yang bervariasi, ada yang menggunakan aksara pegon seperti *Swara Nahdlatol Oelama*, huruf latin seperti *Oetoesan Nahdlatol Oelama*, juga ada yang sudah berbahasa Indonesia seperti *Berita Nahdlatol Oelama*.

Kesadaran politik NU mulai tampak dan cukup diperhitungkan pada 1930-an. NU dengan berani menantang Pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut kebijakan Ordonansi Guru.¹⁴⁰ Sikap NU yang demikian itu dapat dimaknai sebagai gertakan yang membuat organisasi-organisasi lain menyadari arti penting NU. NU cukup aktif melibatkan diri dalam sejumlah perkumpulan yang dirintis oleh organisasi lain sepanjang dekade itu, salah satu di antaranya yang terkenal adalah Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada September 1937.

Perilaku politik NU tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip doktrin politik para ulama abad pertengahan juga jejak sejarah pemerintahan Islam dari sejak era Rasulullah Saw., Khulafaurasyidin, sampai dengan Dinasti Umayyah, dan Abbasiyah. NU sebagai organisasi Islam tradisional menggali khazanah referensi mengenai fikih politik dari ulama-ulama yang pernah menulis risalah

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 48.

mengenai tatakelola pemerintahan dan politik. Salah satu rujukan klasik mengenai fikih tatakelola pemerintahan dan politik Islam yang biasa digunakan oleh NU adalah *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi. Pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks fikih itu cukup memengaruhi sikap politik NU yang dikenal moderat, luwes, dan bijaksana.¹⁴¹

NU semakin aktif melibatkan diri dalam berbagai perhimpunan pada 1940-an sampai dengan Indonesia merdeka. NU bersama Muhammadiyah dipercaya untuk menjadi pengurus inti sebuah federasi bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) menjelang akhir 1943. Tak sedikit para aktivis NU yang dipercaya untuk memimpin organisasi militer umat Islam seperti Hizbullah¹⁴² dan Sabilillah.¹⁴³ K.H. Abdul Wahid Hasyim, salah satu tokoh NU dipercaya menjadi anggota BPUPKI yang turut merumuskan Piagam Jakarta. NU juga menjadi inisiator perlawanan terhadap Belanda dan Sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Para kiai NU di Pulau Jawa mencetuskan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 sebagai fatwa resmi untuk melawan pasukan NICA dan Sekutu. Berbagai rekam jejak NU yang telah diuraikan sebelumnya menjadi bukti kesungguhan NU dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

NU bersama dengan sejumlah organisasi Islam lain turut menginisiasi pembentukan Masyumi. Keberadaan NU sebagai anggota istimewa Masyumi dalam hanya bertahan selama kurang lebih 7 tahun. NU memutuskan keluar dari

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.66.

¹⁴² H. Zainul Arifin dipercaya menjadi Pemimpin Tertinggi Laskar Hizbullah yang dibentuk pada era Pendudukan Jepang. Lihat dalam Suratmin, *Perjuangan Laskar Hizbullah*. Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2010, hlm 22.

¹⁴³ Pada saat Masyumi dibentuk pada 7 November 1945, K.H. Masykur dipercaya untuk menjadi pimpinan bagian Hizbullah dan Sabilillah. Suratmin menyatakan, Masykur dipercaya menjadi Pemimpin Tertinggi Laskar Sabilillah. *Ibid*, hlm 33.

Masyumi pada 1952. NU bertransformasi menjadi partai politik tersendiri pasca keluar dari Masyumi dan bertahan sebagai partai politik. NU menjadi partai yang mewakili golongan Islam selama era Demokrasi Terpimpin. Kiprah NU sebagai partai politik mulai merosot pada era Orde Baru. NU dipaksa berfusi bersama PSII Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973.¹⁴⁴ NU memutuskan kembali menuju khittah 1926 pada 1984, dengan demikian NU berhenti dari segala aktivitas politik dan berfokus kembali pada berbagai program pengembangan umat Islam di Indonesia.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Greg Fealy dan Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: Lkis, 1997, hlm. 3.

¹⁴⁵ *Ibid.*